



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : **T-09846**/Dt.10.01/ME.01.01/05/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengingat Masa Pelaporan Triwulan
II TA 2025 pada Aplikasi e-Monev
Berdasarkan PP 39/2006

Jakarta, 24 Juni 2025

Yth. Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga
(*terlampir*)

Sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga berdasarkan PP 39/2006, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu di Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan pelaporan tepat waktu melalui e-Monev pada Triwulan I yang lalu, bersama ini, kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelaporan dan proses verifikasi Triwulan II TA 2025 melalui e-Monev:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan II TA 2025 dilakukan melalui e-Monev (<http://e-monev.bappenas.go.id>) untuk melaporkan realisasi **Komponen, Rincian Output, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Indikator Kinerja Program** tahun berjalan.
2. Selanjutnya, setelah Triwulan berakhir, Kementerian/Lembaga (C.q: Biro Perencanaan) bertanggung jawab untuk melakukan **verifikasi** data yang telah dilaporkan oleh UKE II melalui e-Monev PP 39/2006. Batas akhir proses verifikasi pada Triwulan II TA 2025 adalah **(21 Juli 2025 Pukul 23.59 WIB)**.
3. Panduan penggunaan e-Monev dapat diunduh pada alamat berikut: https://e-monev.bappenas.go.id/portal/assets/files/sosialisasi_e-Monev_2025_paparan.pdf.
4. Bersama ini pula, kami melampirkan daftar **10 K/L terbaik** dalam hal pelaporan melalui e-Monev.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi kami:

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
JL. TAMAN SUROPATI NO.2, MENTENG, KEC. MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT
Telp/fax: 021-50927412
e-mail: laporan.pp39@bappenas.go.id

Direktur Sistem dan Manajemen Risiko,



Prakosa Grahayudiandono

Tembusan:
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan.

DAFTAR KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Kementerian Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Keuangan;
11. Kementerian Pertanian;
12. Kementerian Perindustrian;
13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Kementerian Perhubungan;
15. Kementerian Kesehatan;
16. Kementerian Agama;
17. Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Kementerian Sosial;
19. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
21. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
23. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
25. Badan Intelijen Negara;
26. Badan Siber dan Sandi Negara;
27. Dewan Ketahanan Nasional;
28. Badan Pusat Statistik;
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
31. Badan Standarisasi Nasional;
32. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
33. Kementerian Komunikasi dan Digital;
34. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
35. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
36. Lembaga Ketahanan Nasional; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
38. Badan Narkotika Nasional;
39. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
40. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
41. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
42. Komisi Pemilihan Umum;
43. Mahkamah Konstitusi;
44. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
45. Badan Informasi Geospasial;
46. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
47. Lembaga Administrasi Negara;
48. Arsip Nasional RI;
49. Badan Kepegawaian Negara;
50. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
51. Kementerian Perdagangan;
52. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
53. Komisi Pemberantasan Korupsi;
54. Dewan Perwakilan Daerah;
55. Komisi Yudisial;
56. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
57. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
59. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
60. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
61. Ombudsman Republik Indonesia;
62. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
63. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
64. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
65. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
66. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
67. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
68. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
69. Badan Keamanan Laut;
70. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
71. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
72. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
73. Badan Pangan Nasional;
74. Otorita Ibu Kota Nusantara;
75. Badan Karantina Indonesia;
76. Badan Gizi Nasional;
77. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

78. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
79. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
80. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
81. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
82. Kementerian Hukum;
83. Kementerian Hak Asasi Manusia;
84. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
85. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
86. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
87. Kementerian Kebudayaan;
88. Badan Penyelenggara Haji;
89. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
90. Kementerian Kehutanan;
91. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
92. Kementerian Pekerjaan Umum;
93. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
94. Kementerian Pariwisata;
95. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
96. Kementerian Koperasi;
97. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
98. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
99. Kementerian Transmigrasi

Direktur Sistem dan Manajemen Risiko,



Prakosa Grahayudiandono

Lampiran II Surat Undangan

Nomor : [T-09846](#)/Dt.10.01/ME.01.01/05/2025

Tanggal : 24 Juni 2025

10 K/L dengan progress pelaksanaan tertinggi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	K/L	% Kelengkapan		% Progress Pelaksanaan	% Serapan Anggaran	Validasi
		RO	Komponen			
1	Lembaga Administrasi Negara	100	100	30,1	22,9	23 May 2025 14:57:00
2	Badan Pemeriksa Keuangan	100	100	27,3	26,8	28 May 2025 15:44:14
3	Badan SAR Nasional	100	100	26,8	28.7	23 May 2025 10:04:02
4	Kementerian Sosial	100	100	26,0	25,2	30 May 2025 22:00:57
5	Dewan Perwakilan Rakyat	100	100	24,6	28.5	30 May 2025 22:38:09
6	Badan Kepegawaian Negara	100	100	22,8	21,0	29 May 2025 20:41:57
7	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	100	100	22.4	24.7	28 May 2025 14:31:16
8	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	100	100	22.1	21.4	30 May 2025 19:39:11
9	Majelis Permusyawaratan Rakyat	100	100	21.3	20,0	27 May 2025 13:51:48

No	K/L	% Kelengkapan		% Progress Pelaksanaan	% Serapan Anggaran	Validasi
		RO	Komponen			
10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100	100	20,6	27,8	28 May 2025 19:56:25

Direktur Sistem dan Manajemen Risiko,



Prakosa Grahayudiandono